



Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau

Mutiara Sani, Dara Aisyah²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: daisyah@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 Mei 2025

Revised 17 Mei 2025

Accepted 01 Juni 2025

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Sani,M., & Aisyah,D. (2025). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2)

ABSTRAK

Kinerja organisasi sektor publik adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, dilihat dari sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan yang muncul adalah masih kurang maksimalnya upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BPBD Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor BPBD Bengkalis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Kinerja Organisasi Publik oleh Moechariono (2010:110), yang terdiri atas indikator input, output, dan outcome. Melalui indikator tersebut, peneliti akan menggambarkan tingkat pencapaian BPBD Bengkalis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator input masih kurang terlaksana dengan baik karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk penanggulangan bencana. Selanjutnya, kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator output juga dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum terpenuhinya kebutuhan kendaraan motor trail untuk mobilitas personil ke lokasi kejadian, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Tasik Serai Barat, serta pelatihan yang hanya terbatas pada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan jarang dilakukan secara berkala. Selain itu, masyarakat umum belum merasakan manfaat pelatihan, dan pengawasan di menara pengawas juga belum dilakukan secara optimal. Sementara itu, kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator outcome juga dinilai belum maksimal. Meskipun telah berhasil mengurangi luas area yang terkena bencana kebakaran, kejadian kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi setiap tahunnya di Desa Tasik Serai Barat.

Kata Kunci: Kinerja Sektor Publik, BPBD, Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

ABSTRACT

The performance of a public sector organization is the totality of the work achieved by an organization, seen from the extent to which the organization can achieve predetermined goals. The problem that arises is that there is still a lack of maximum efforts to overcome forest and land fire disasters carried out by BPBD Bengkalis. This study aims to describe and analyze the performance of BPBD Bengkalis in overcoming forest and land fires in Tasik Serai Barat Village, Talang Muandau District. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Data



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

collection was carried out through interview techniques, observation and documentation at the Bengkalis BPBD Office. Data analysis was carried out using the concept of Public Organization Performance by Moechariono (2010: 110), which consists of input, output, and outcome indicators. Through these indicators, researchers will describe the level of achievement of BPBD Bengkalis in the implementation of forest and land fire disaster management to realize the organization's goals, objectives, vision and mission. The results of this study indicate that the performance of BPBD Bengkalis seen from the input indicator is still not well implemented due to limited Human Resources (HR) and budget for disaster management. Furthermore, the performance of BPBD Bengkalis seen from the output indicator is also considered not optimal. This is due to several factors, such as the unmet need for dirt bike vehicles for personnel mobility to the scene, the absence of socialization to the people of Tasik Serai Barat Village, and training that is only limited to the Fire Care Community (MPA) and is rarely carried out regularly. In addition, the general public has not felt the benefits of training, and supervision at the watchtower has not been carried out optimally. Meanwhile, the performance of BPBD Bengkalis seen from the outcome indicator is also considered not optimal. Although it has succeeded in reducing the area affected by fire disasters, forest and land fires still occur every year in Tasik Serai Barat Village.

Keywords: Public Sector Performance, BPBD, Land and Forest Fire Disaster Manajement.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerentanan dan potensi bencana yang sangat tinggi. Secara geografis, Indonesia terletak diantara pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yakni Lempeng Hindia-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di sebelah barat, dan Lempeng Pasifik di sebelah timur (Wibowo & Sembri, 2016). Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan masalah yang rutin terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau (Yusuf, dkk, 2019).

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis sudah terjadi sejak lama hingga saat ini dan sulit untuk ditangani. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis sudah terjadi sejak tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian Maylani & Mashur (2019), dijelaskan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 merupakan bencana kabut asap yang terparah, dimana pada tahun 2015 bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 283 kasus dengan luas terbakar 1.251 Ha. Sedangkan tahun 2016, bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 378 kasus dengan luas terbakar 1.345 Ha. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Bengkalis kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan, terjadi sebanyak 76 kasus dengan luas terbakar 222, 91 Ha. Kemudian pada tahun 2018, kembali mengalami peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan yaitu terjadi sebanyak 113 kasus dengan luas terbakar 655, 62 Ha.

Penyebab terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara alami dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan secara alami terjadi akibat faktor perubahan alam dan kondisi iklim yang ekstrem, meliputi: adanya fenomena Elnino, angin, suhu yang sangat panas, musim kemarau yang berkepanjangan, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia terjadi karena aktivitas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan menggunakan metode tebas-bakar (BNPB, 2019).

Pemerintah menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah masalah kompleks yang mempengaruhi banyak aspek. Masalah ini menyebabkan kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, berdampak negatif pada kesehatan, dan mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga memengaruhi negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia, yang menuduh Indonesia sebagai pengekspor asap (Syarifah, dkk, 2020). Kompleksitas dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum untuk mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang tersebut

juga mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas kebencanaan, sehingga diharapkan dapat mengelola penanggulangan bencana terutama dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan bencana, yang mencakup berbagai tahap, yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tugas ini bukan hanya kegiatan tanggap darurat, tetapi juga melibatkan perencanaan, pencegahan, serta pemulihan. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis dituntut untuk bekerja secara optimal dalam setiap proses penanggulangan bencana.

Penelitian ini berfokus pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan secara mendalam terkhusus di Desa Tasik Serai Barat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, baik dalam hal kesiapsiagaan, pencegahan maupun respon saat kebakaran terjadi. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau”.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:4) mengartikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, penggunaan metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti. Metode ini tepat digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai kinerja BPBD Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis.

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada penelitian ini, pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dan didasari atas beberapa pertimbangan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis. Akan tetapi, Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya masih terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, pada tahun 2023 Kabupaten Bengkalis mendapat posisi pertama penyumbang kebakaran hutan dan lahan terluas di Provinsi Riau.

2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggali sumber data di kelembagaan yang bertugas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurut lofland dan lofland (Moleong, 2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari informan secara langsung. Pada penelitian ini, data diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan yang dinilai mampu untuk memberikan informasi tentang kondisi yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperlukan untuk memberikan tambahan data atau memperkuat data primer yang telah diperoleh sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

buku, jurnal, karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan dokumen serta catatan yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis.

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2013:226) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang merupakan fakta yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008:127).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008:158).

2.3 Penentuan Informan

Menurut (Margono, 2004) pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait topik tertentu dalam rangka mendukung suatu penelitian dan dipilih melalui berbagai pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan. Informan berfungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Key Informan	Informan utama
1	Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis	1 Orang	-
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bengkalis	-	1 Orang
3	Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Bengkalis	-	1 Orang
4	Kepala Desa Tasik Serai Barat	1 Orang	-
5	Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Tarik Serai Barat	-	1 Orang
6	Masyarakat	-	3 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2.4 Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Salim dan Syahrur, 2012:147) terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis, yaitu :

1. Kondensasi data

Kondensasi data dapat dipahami sebagai proses memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola, atau dapat juga diartikan dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo (Salim dan Syahrums, 2012:148).

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (Salim dan Syahrums, 2012:149) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah proses reduksi, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif bersama dengan bentuk lain seperti tabel, grafik, dan diagram. Hal tersebut dilakukan guna menggabungkan informasi secara terpadu sehingga mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan dan membantu pembaca untuk memahami penelitian yang telah dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan berasal dari data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. Hasil pengolahan penelitian membawa penemuan baru berupa gambaran atau penjelasan tentang objek yang sebelumnya tidak jelas.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Teknik keabsahan data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2017:330):

1. Triangulasi sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

2. Triangulasi metode

Menurut Patton (Moleong, 2017:331) dalam triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti dapat diartikan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Singkatnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi teori

Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2017:331) menganggap bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teori adalah melakukan sinkronisasi antar hasil penelitian dengan teori yang digunakan kalau tidak sesuai maka peneliti dapat mencari teori yang tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan permasalahan yang terjadi secara berkala setiap tahunnya, terutama saat musim kemarau (Yusuf, dkk, 2019). Salah satu daerah yang sering mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Riau, dengan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu wilayah yang terdampak setiap tahun. Setelah melakukan pemetaan penyusunan desa sasaran patroli terpadu di daerah tersebut, diketahui bahwa Desa Tasik Serai Barat di Kecamatan Talang Muandau merupakan salah satu desa yang sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kompleksitas dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan penanggulangan yang dapat dilakukan secara terpadu. Oleh sebab itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Undang-Undang ini yang kemudian membentuk kelembagaan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atas

penanggulangan bencana, diharapkan dapat mengelola penanggulangan bencana terutama dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu dalam proses penanggulangan bencana dituntut untuk bekerja secara optimal.

Secara teoritis untuk menggali dan mendapatkan informasi, peneliti menggunakan konsep kinerja organisasi publik oleh Moehariono (2010:110) yang menjabarkan bahwa untuk menilai kinerja organisasi publik diperlukan indikator-indikator, yaitu: (1) Masukan (input), (2) Keluaran (output), dan (3) Hasil (outcome). Kinerja yang dimaksud dalam hal ini ialah bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau. Maka untuk melihat pelaksanaan kinerja BPBD Bengkulu dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau, peneliti menguraikan hasil wawancara terhadap informan. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, yang mana beberapa pertanyaan telah disiapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama penelitian. Sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

3.1 Masukan (Input)

Secara umum, input dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses dalam suatu kegiatan. Dilihat dari perspektif sektor publik, input kinerja atau masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Input kinerja atau masukan menjadi indikator awal penentu keberhasilan pelaksanaan suatu program-program, dalam hal ini program-program instansi pemerintah. Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan input kinerja yang banyak agar sasaran dan tujuan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Peneliti menguraikan beberapa kategori untuk mengukur input dari kinerja BPBD Bengkulu, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Bengkulu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu atau kelompok dalam pengelolaan organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kinerja untuk mencapai tujuan organisasi (Shafritz dan Russel dalam Keban, 2008:93). Menurut Sri Maryuni (2016:11), Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Selanjutnya, Moehariono (2010:110) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat berdasarkan kualitas dan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu organisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Bengkulu, Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil dari BPBD Bengkulu yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri dari 175 personil yang ditempatkan di setiap Kecamatan, hasil wawancara dengan Bapak Sufandi selaku Kepala Pelaksana BPBD Bengkulu, beliau mengatakan:

“Untuk personil itu kami memiliki 175 personil, namun ini dibagi-bagi lagi ke 11 Kecamatan. Jadi untuk saat ini, personil BPBD Bengkulu cukuplah.” (wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah personil BPBD Bengkulu saat ini dianggap sudah mencukupi untuk kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Talang Muandau.

2. Tersedia anggaran

Indikator masukan (input) dapat juga dilihat dari ada atau tidaknya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana atau keadaan darurat. Menurut Moehariono (2010:110), anggaran merupakan salah satu jenis input yang sangat penting karena tanpa adanya alokasi dana yang memadai, program atau kegiatan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sementara Soerjadi (1993) dalam (Sri Maryuni, 2016:12) mengartikan anggaran sebagai sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan. Adanya anggaran dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Kusnen selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bengkalis, beliau menjelaskan:

“Proses alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di BPBD Bengkalis dilakukan melalui anggaran APBD Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan setiap tahun. Khusus di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan anggarannya tergolong kecil, tidak sampai 200 Juta/Tahun. Bengkalis ada 11 Kecamatan, belum rangkap Desa lagi. 1 Kecamatan saja dapat menghabiskan 20 Juta ketika dilakukannya sosialisasi, pelatihan, edukasi dan mitigasi, 20 Juta itu sudah termasuk perjalanan dinas ke lokasi yang dituju, uang makan peserta dan juga uang saku peserta.” (wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 10.30 WIB)

Sementara itu, Bapak Sufandi selaku Kepala Pelaksana BPBD Bengkalis menyampaikan:

“Khusus anggaran kebencanaan itu ada sebesar 4 Miliar/Tahun, namun anggaran ini bukan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan saja, akan tetapi mencakup semua bencana, baik bencana alam maupun non alam” (wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sangat terbatas, yakni kurang dari 200 juta rupiah per tahun, yang harus dibagi untuk 11 kecamatan dan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan mitigasi. Adapun keseluruhan total anggaran kebencanaan sebesar 4 miliar rupiah/tahun mencakup semua jenis bencana, baik alam maupun non alam, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, jumlah yang tersedia untuk kebakaran hutan dan lahan masih sangat terbatas, sehingga bisa mempengaruhi efektivitas penanganan dan pencegahan bencana di Bengkalis.

Dengan demikian, indikator input dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Bengkalis memiliki jumlah personil yang terbatas untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu hanya mengerahkan 3-4 personil ke lokasi kejadian di Desa Tasik Serai Barat. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi jarak yang jauh dari posko siaga ke Desa Tasik Serai Barat menempuh sekitar 3 jam lamanya, serta kurangnya pemahaman personil BPBD Bengkalis terhadap prosedur standar operasi (SOP) sehingga keterlibatan mereka hanya sampai di tahun 2020.

Selanjutnya, untuk anggaran khusus penanggulangan bencana dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan terbatas dengan jumlah anggaran sebesar 4 miliar rupiah/tahun mencakup semua jenis bencana, baik alam maupun non alam. Tidak adanya kejelasan pembagian anggaran dapat dinilai bahwa pihak BPBD Bengkalis kurang transparansi dalam alokasi anggaran. Selain itu juga pihak BPBD Bengkalis belum mempunyai peta rawan bencana, akibatnya BPBD Bengkalis menghadapi tantangan dalam menjalankan program penanggulangan dengan efektif dan efisien. Sehingga masih perlu membutuhkan perbaikan dalam peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur dan transparan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

3.2 Keluaran (Output)

Menurut Moehariono (2010:110) mendefinisikan keluaran (output) adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana, serta program kerja yang jelas.

1. Tersedianya sarana dan prasarana

Menurut Moehariono (2010:110), sarana merujuk kepada segala bentuk alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas atau proses dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana mengacu pada segala bentuk fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai kegiatan. Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo (2011:102), Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Maka,

tersedianya sarana dan prasarana BPBD Bengkalis dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan faktor krusial untuk merasakan keluaran (output) dari kinerja BPBD Bengkalis.

Wawancara peneliti dengan Bapak H. Syafrudiin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Bengkalis, beliau menjelaskan:

“Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Bengkalis saya rasa belum mencukupi. Hal ini dikarenakan, posko-posko BPBD yang ada di Kecamatan itu hanya memiliki alat-alat yang masih standar untuk pemadaman awal yaitu selang pemadaman itupun masih ditemukan beberapa alat yang tidak berfungsi maksimal. Kemudian BPBD Bengkalis juga masih kekurangan terkait alat mobilisasi personil kita mau ke lokasi kejadian yaitu motor trail. Jadi bisa dikatakan jika bencana kebakaran hanya terjadi di 1 atau 2 titik lokasi kejadian, dengan sarana dan prasarana yang ada masih cukup. Namun, jika kebakaran hutan dan lahan terjadi dibanyak titik lokasi, maka kami akan kesulitan, itulah mengapa juga kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat membantu sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.” (wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 17.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan dan data diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana BPBD Bengkalis dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mempengaruhi hasil kerja mereka.

2. Program kerja yang jelas

Menurut Moehariono (2010), program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut Indah (Hutabarat, 2024:1462), suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program kerja dibuat untuk mengartikulasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dibuktikan dan hasil yang dapat diukur sehingga menjadi tindakan yang nyata. Program kerja yang jelas dalam penelitian ini adalah program kerja dari BPBD Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sufandi selaku Kepala Pelaksana BPBD Bengkalis, beliau mengatakan:

“Program yang kami lakukan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, kemudian pihak kami juga memberikan pelatihan kepada masyarakat baik di Kecamatan ataupun di Desa untuk jangan membuka lahan sembarangan dengan cara membakar agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu kami juga melakukan mitigasi, dan kami juga sudah membuat posko di setiap Kecamatan dan menempatkan tim rescue kita di Kecamatan. Hal itu dilakukan karna jarak BPBD Bengkalis ke setiap Kecamatan itu cukup jauh, sehingga dengan adanya posko di Kecamatan menjadi pertolongan pertama di lokasi kejadian. Kemudian pihak kami juga mendukung Desa dalam pembuatan sekat kanal dan menara/tower pengawas kebakaran hutan dan lahan, dimana pembuatan sekat kanal ini tugas dari Dinas PU akan tetapi BPBD Bengkalis yang menyampaikan ke Dinas PU disertai dengan data-data pendukung bahwa ada Desa yang butuh dibuat sekat kanal.” (wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa program kerja BPBD Bengkalis untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan mencakup sosialisasi, edukasi, pelatihan, mitigasi, dan dukungan infrastruktur. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sekolah tentang bahaya membakar lahan. BPBD juga melatih masyarakat di kecamatan dan desa serta mendirikan posko di setiap kecamatan untuk respons cepat. Selain itu, mereka mendukung pembuatan sekat kanal dan menara pengawas kebakaran.

Pihak BPBD Bengkalis mengatakan bahwa ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jumain selaku Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Tasik Serai Barat, beliau menyampaikan:

“Ada, tapi itu hanya diberikan kepada MPA saja, masyarakat yang lainnya tidak. Kegiatan itu pun dilakukan sudah lama sekali, terakhir kali diberikan pada tahun 2019.”
(wawancara tanggal 14 Mei, pukul 11.00 WIB)

BPBD Bengkalis memiliki program kerja yang meliputi sosialisasi, pelatihan, pengawasan, serta dukungan infrastruktur yaitu sekatkanal dan menara pengawas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun di Desa Tasik Serai Barat, BPBD Bengkalis belum pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga aparat desa hanya memberikan sebatas himbauan kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas, hanya diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan terakhir dilakukan pada tahun 2019, sehingga perlu pelatihan yang lebih luas dan berkala untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, Pengawasan yang dilakukan oleh BPBD Bengkalis di menara pengawas hanya berlangsung hingga tahun 2020, ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap potensi bencana masih kurang dan saat ini hanya dilakukan oleh MPA. Oleh sebab itu, kinerja BPBD Bengkalis dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan melalui penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program kerja yang lebih efektif dan menyeluruh, serta pelatihan yang mencakup masyarakat umum.

3.3 Hasil (Outcome)

Menurut Moehariono (2010:110), hasil (outcome) merupakan seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sementara menurut Mahsun (2006), hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung, dengan demikian hasil yang diharapkan yakni tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil yang dicapai oleh BPBD Bengkalis dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dari pengurangan area yang terkena bencana kebakaran tersebut. Berikut wawancara dengan Bapak Sufandi selaku Kepala Pelaksana BPBD Bengkalis, beliau menyampaikan:

“Yang pasti itu berkurang. Kalau tahun-tahun dulu itu Provinsi Riau cukup menggemparkan di tingkat nasional terkait kebakaran hutan dan lahan, dan di Kabupaten Bengkalis sendiri kebakaran hutan dan lahan yang terbesar itu sampai tahun 2019, setelahnya sudah ada pengurangan.”
(wawancara tanggal 24 April 2024, pukul 15.30 WIB)

Demikian juga disampaikan oleh Bapak Lamhot selaku Ketua RT.002 RW.003 Desa Tasik Serai Barat, beliau mengatakan:

“Menurut saya memang sudah terjadi pengurangan bencana kebakaran hutan dan lahan, terakhir bencana kebakaran hutan dan lahan terparah di Desa ini itu di tahun 2019, dimana BPBD Provinsi turut serta mengerahkan Helikopternya.”(wawancara tanggal 13 Mei 2024, pukul 9.00 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Doni selaku masyarakat Desa Tasik Serai Barat, beliau menyampaikan:

“Bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa ini memang sudah ada pengurangan terjadinya.”
(wawancara tanggal 15 Mei 2024, pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasik Serai Barat telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat mengakui adanya pengurangan luas area kebakaran, yang berarti ada upaya BPBD Bengkalis untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun, masyarakat masih ada keinginan untuk melihat pengurangan yang lebih signifikan dan berharap BPBD Bengkalis lebih aktif terlibat dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan di Desa tersebut.

Berikut wawancara dengan Bapak David yang merupakan masyarakat Desa Tasik Serai Barat, beliau menyampaikan:

“Saya yang tinggal di lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, untuk kebakaran hutan dan lahan ini masih ada hingga saat ini, tapi bisa dikatakan memang ada pengurangan kebakaran hutan dan lahan di Desa kita ini. Sebagai masyarakat saya berharap BPBD bisa lebih aktif dalam melakukan patroli rutindi titik-titik rawan, dan memberikan sosialisasi mengenai cara mencegah kebakaran agar warga lebih mengerti dan sadar pentingnya pencegahan kebakaran” (wawancara tanggal 15 Mei 2024, pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jumain selaku Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Tasik Serai Barat, beliau mengatakan:

“Dari tahun 2019 sampai sekarang ini, Desa kita ini memang terus mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan. Tapi memang untuk luasnya kasus kebakaran itu berkurang. Harapan saya pemerintah memberikan lebih banyak dukungan dalam bentuk pelatihan maupun alat untuk membantu masyarakat membuka lahan dengan cara yang lebih aman, karna di zaman sekarang ini orang-orang sangat membutuhkan lahan baik itu untuk perkebunan ataupun pembangunan gedung” (wawancara tanggal 14 Mei, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir, Desa Tasik Serai Barat terus mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sejak tahun 2019, kebakaran tetap terjadi namun untuk luas kebakarannya berkurang. Oleh sebab itu, masyarakat berharap peran aktif BPBD Bengkalis dalam patroli, sosialisasi pencegahan kebakaran, serta dukungan berupa pelatihan dan alat untuk pembukaan lahan yang aman. Dengan demikian, indikator hasil (outcome) dari upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Bengkalis menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, luas area yang terkena kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasik Serai Barat telah berkurang. Namun, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di desa tersebut. Sehingga masyarakat berharap BPBD Bengkalis untuk lebih aktif dalam melakukan patroli rutin di titik-titik rawan kebakaran, memberikan sosialisasi mengenai cara pencegahan kebakaran, serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan alat untuk membuka lahan secara aman. Oleh sebab itu, meskipun BPBD Bengkalis telah membuat kemajuan dalam mengurangi dampak kebakaran, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dan memenuhi harapan masyarakat sepenuhnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang menggunakan pendekatan indikator kinerja organisasi publik (input, output, dan outcome), dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Tasik Serai Barat masih belum optimal, dengan berbagai hambatan struktural dan operasional yang menghambat efektivitas kerja organisasi.

Pertama, **dari aspek input**, BPBD Bengkalis menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang signifikan. Jumlah personel yang dikerahkan ke lokasi kejadian hanya berkisar 3–4 orang dan terhambat oleh jarak geografis yang jauh dari posko utama. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur standar operasi (SOP) juga menunjukkan rendahnya kapasitas teknis internal. Di sisi lain, alokasi anggaran penanggulangan bencana yang kurang dari Rp200 juta per tahun untuk 11 kecamatan menunjukkan rendahnya prioritas anggaran terhadap isu karhutla, terutama jika dibandingkan dengan total anggaran kebencanaan sebesar Rp4 miliar untuk seluruh jenis bencana. Belum tersedianya peta rawan bencana dan rendahnya transparansi anggaran turut memperlemah basis perencanaan dan akuntabilitas publik BPBD.

Kedua, **dari sisi output**, meskipun terdapat penyediaan sarana seperti kendaraan, mesin pemadam, dan selang, ketersediaan alat-alat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Ketiadaan kendaraan trail untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses menjadi kendala teknis yang krusial. Program kerja seperti sosialisasi dan pelatihan juga belum merata. Kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran belum pernah menysasar langsung masyarakat Desa Tasik Serai Barat, sementara pelatihan hanya menysasar kelompok terbatas seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), yang tidak dilakukan

secara berkala. Upaya pengawasan melalui menara pantau juga terhenti sejak 2020, sehingga mengurangi efektivitas deteksi dini kebakaran.

Ketiga, **dari sisi outcome**, dampak dari intervensi BPBD terhadap pengurangan kejadian dan risiko karhutla masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Meskipun terdapat capaian dalam hal pengurangan luas area yang terbakar, kejadian kebakaran masih berlangsung setiap tahun, menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan belum tercapai secara menyeluruh. Harapan masyarakat terhadap peran aktif BPBD dalam memberikan perlindungan dan respons cepat terhadap bencana belum sepenuhnya terpenuhi, disebabkan oleh hambatan pada sisi input dan output yang bersifat sistemik.

Dengan demikian, peningkatan kinerja BPBD Bengkalis perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh, termasuk penambahan sumber daya manusia dan sarana pendukung, peningkatan kualitas dan frekuensi pelatihan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan berbasis risiko. Selain itu, perencanaan kebijakan yang berbasis data seperti penyusunan peta rawan bencana perlu segera diwujudkan sebagai dasar penanganan bencana yang lebih terukur dan terintegrasi.

Referensi

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Frantika, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Krisnanto, Ferdin. (2017). *Patroli Terpadu: Sinergi Pengendalian Karhutla di Tingkat Tapak*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Malawat, S. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Moehariono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong J. Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, & Kurniawan, S. (2007). *Fakta Hutan dan Kebakaran 2002 - 2007*. Pekanbaru.
- Notohadinegoro, T. (2006). *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Purbowaseso. (2004). *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratminto, & Atik. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Satibi, I. (2012). *Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung: UNPAS Press.
- Singarimbun, M., & Sofian, E. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sobandi, Baban. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Steers, R. M. (2003). *Organization Effectiveness A Behavioral View*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaufina, L. (2008). *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Prilaku Api, Penyebab dan Dampak Kebakaran*. Bandung: Bayu Media Publishing.
- Usiono, dkk. (2018). *Disaster Management*. Medan: Perdana Publishing.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Skripsi

- Effendi, E., Prasetyo, A. B., & Kurniawan, F. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Menghadapi Bencana Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2(1), 36-47.

- Fadillah, dkk.(2022). Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 722-732.
- Fajri, J. & Alhadi Z. (2022). Kendala yang Ditemui dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Oleh BPBD Kabupaten Bengkalis Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2), 16673-16680.
- Fiqra, M., & Novella, Y. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Konstituen Vol*, 5(1), 56-73.
- Hasibuan, S. R. (2018). Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
- Hazly, M. Z. (2022). Efektivitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Hutabarat, L. (2024). Pengaruh Program Kerja dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1459-1469.
- Junery, M. F., & Norhanisah, N. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 142-150.
- Maryuni, S. (2016). Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(1).
- Maylani & Mashur.(2019). Faktor –Faktor Collaborative Governance dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosia dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-15.
- Rafdi, dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 3384-3898.
- Sembiring, S. B. (2022). Kapasitas Dinas Sosial dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Melalui Pendistribusian Jaminan Hidup dan Isian Hunian Tetap Masyarakat Desa Berastepu. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 467-474.
- Siahaan, H. F. A. (2023). Kinera Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).
- Supriyatna, Y. (2007) Analisis Dampak Bencana Terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE. *Jurnal Online*, [https://lib. ui. ac, id/file](https://lib.ui.ac.id/file).
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan asap kabut akibat kebakaran hutan di wilayah perbatasan Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 3(1), 59-75.
- Syafril, S., & Sulandari, S. (2018). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy and Management Review*, 8(1), 65-81.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- Tanjung, M., & Lubis, R. H. (2023). PENGARUH SARANA DAN PRASARANA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 5(1), 57-70.
- Wibowo, N. B., & Sembri, J. N. (2016). Analisis Peak Ground Acceleration (PGA) dan Intensitas Gempabumi berdasarkan Data Gempabumi Terasa Tahun 1981-2014 di Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Indonesian Journal of Applied Physics*, 6(01), 65-72.
- Wulansari, dkk. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(3), 407-421.
- Yusuf, A., Hapsoh, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 67-84.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja BPBD Bengkalis.

Artikel

Bnpb.go.id. <https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia#:~:text=BENGKALIS%20%2D%20Kebakaran%20hutan%20dan%20lahan,lahan%2C%20dan%20disengaja%20karena%20dibayar> diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 22:12 WIB.

Brgm.go.id. <https://brgm.go.id/brgm-tetapkan-bengkalis-sebagai-model-restorasi-gambut-sitematis-dan-terpadu/> diakses pada 27 Juli pukul 20.26 WIB.

Cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019> diakses pada 26 Juli 2023 pukul 14.35 WIB.

Riaulink.com. <https://riaulink.com/news/detail/31182/luas-lahan-terbakar-di-riau-990-hektar-terbanyak-di-bengkalis> diakses pada 26 Juli 2023 pukul 16.15 WIB.